

**OPTIMALISASI KINERJA BPBD DALAM DISEMINASI INFORMASI
MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN KOTAAGUNG,
KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

Oleh

**RIZKI ASTUTI
1716041064**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**OPTIMALISASI KINERJA BPBD DALAM DISEMINASI INFORMASI
MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN KOTAAGUNG,
KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

RIZKI ASTUTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

OPTIMALISASI KINERJA BPBD DALAM DISEMINASI INFORMASI MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN KOTAAGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh:

RIZKI ASTUTI

Program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah negara yang rawan akan kejadian bencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja serta upaya BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang informan.

Hasil penelitian ini berdasarkan 7 (tujuh) indikator menyatakan bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek tujuan telah optimal karena seluruh masyarakat tidak hanya telah mengetahui tujuan dari PRBBK berdasarkan kegiatan yang telah tersusun di dalam renstra BPBD Kabupaten Tanggamus melalui sosialisasi dan sekolah kebencanaan. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri juga telah melakukan kegiatan simulasi bersama masyarakat serta masyarakat telah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan mitigasi bencana tsunami. Sedangkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek standar, kelengkapan peralatan, kompetensi aparatur, motif, peluang dan umpan balik dinyatakan belum optimal karena terkendala oleh dana yang mempengaruhi segala aspek pengukur keoptimalan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami. Kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami yaitu dengan membuat proposal untuk pencairan dana sebagai penunjang keberlanjutan kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana serta bekerja sama dengan destana yang telah dibentuk.

Kata Kunci: Optimalisasi Kinerja, Diseminasi Informasi, Mitigasi Bencana Tsunami

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF PERFORMANCE OF BPBD IN INFORMATION DISSEMINATION OF TSUNAMI DISASTER MITIGATION IN KOTAAGUNG DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY

BY:

RIZKI ASTUTI

Disaster management programs are a priority for the government because Indonesia is a country that is prone to disasters. This study aims to obtain an overview of the performance and efforts of BPBD in optimizing the dissemination of tsunami disaster mitigation information in Kotaagung District, Tanggamus Regency. This research is a type of qualitative descriptive research. The informants in this study amounted to 11 informants.

The results of this study based on 7 (seven) indicators stated that the performance of the BPBD of Tanggamus Regency based on the aspect of the goal was optimal because the entire community not only knew the objectives of CBDRM based on the activities that had been arranged in the BPBD strategic plan of Tanggamus Regency through socialization and disaster schools. However, the BPBD of Tanggamus Regency itself has also carried out simulation activities with the community and the community has learned things related to tsunami disaster mitigation activities. Meanwhile, the performance of the BPBD of Tanggamus Regency based on aspects of standard, completeness of equipment, apparatus competence, motives, opportunities and feedback was declared not optimal because it was constrained by funds that affected all aspects of measuring the optimal performance of the BPBD of Tanggamus Regency in disseminating information on tsunami disaster mitigation. Then the efforts made by BPBD in optimizing the dissemination of tsunami disaster mitigation information, namely by making proposals for disbursement of funds to support the sustainability of disaster mitigation information dissemination activities and in collaboration with the established villages.

Keywords: *Performance Optimization, Information Dissemination, Tsunami Disaster Mitigation*

Judul Skripsi

: **OPTIMALISASI KINERJA BPBD DALAM
DISEMINASI INFORMASI MITIGASI
BENCANA TSUNAMI DI KECAMATAN
KOTAAGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa

: **Rizki Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716041064**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

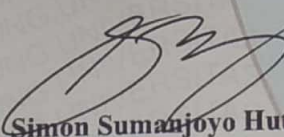
Fakultas

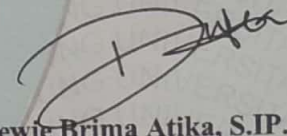
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Pembimbing I

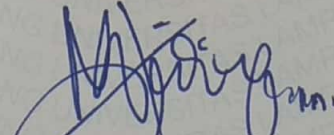
Pembimbing II


Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 198212122008012017

2. Mengetahui

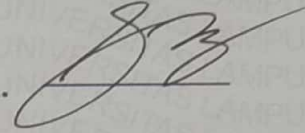
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

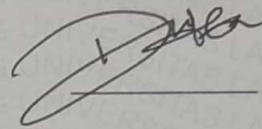
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

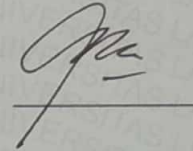
Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.**



Sekretaris : **Dewie Brima A., S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 November 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Rizki Astuti
NPM 1716041064

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Pasar Madang pada tanggal 12 Juli 1999. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan Hermansyah dan Sa'imah. Peneliti bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Gg. Camar RT/RW 005/004 Desa Terbaya, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Peneliti menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kuripan yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017, peneliti tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, peneliti turut aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan di kampus. Keikutsertaan peneliti dalam organisasi kemahasiswaan di kampus dimulai sejak peneliti menjadi mahasiswa baru yakni peneliti tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai anggota bidang hubungan luar pada tahun 2017-2018

dan dilanjut sebagai anggota bidang Rumah Tangga Organisasi (RTO) pada tahun 2018-2020. Tak hanya Himagara, peneliti pula ikut tergabung di dalam Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai staff bidang kemuslimahan pada tahun 2017-2018, lalu peneliti mendapat amanah untuk menjadi sekretaris bidang akademik dan riset FSPI pada tahun 2019-2020. Terakhir, peneliti tergabung di dalam MPM-DPM U KBM UNILA sebagai anggota komisi iv yaitu hubungan luar dan kemediaan pada tahun 2020-2021. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di awal tahun 2020 di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji kurang lebih selama 40 hari dan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di pertengahan tahun 2020 di PT. Lampung Jasa Utama.

MOTTO

“Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Whatever you are, be a good one”

(Abraham Lincoln)

“Jalani, syukuri, nikmati apapun yang terjadi, selalu libatkan Allah SWT dalam setiap langkahmu”

(Rizki Astuti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Sa'imah yang telah mendidikku sejak kecil, yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu mendoakanku di setiap sujudnya, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepadaku, serta melakukan pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberlangsungan hidup dan keberhasilanku. Terima kasih telah hadir sebagai malaikat dan penyemangat hidupku

Kakak-kakakku tersayang, Uwo Emaliya Safithri, Odo Apriansyah, Abang Iparku Adityawan, serta malaikat kecilku, keponakan tersayang M. Jalal Rafif Aditya. Terima kasih telah memberi keceriaan dan semangat dalam hidupku

Almamater Tercinta, Program Studi Ilmu Adminisrasi Negara, FISIP,
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Optimalisasi Kinerja BPBD dalam Diseminasi Informasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri peneliti. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, saran dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan peneliti dapat terlewati dengan baik.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas saran dan masukannya kepada peneliti hingga akhirnya skripsi ini selesai
5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu serta waktunya yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan hingga akhir skripsi ini
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu serta waktunya yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan hingga akhir skripsi ini

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama peneliti menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara
9. Aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan kesempatan dan kerja samanya selama peneliti melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi ini
10. Teristimewa diriku sendiri Rizki Astuti. Terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terima kasih telah kuat, telah sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi selama sebelum hingga akhir proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ini merupakan langkah awal menuju kesuksesanmu kelak (Aamiin Ya Rabbal Alamin)
11. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Sa'imah atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, keikhlasan, kesabaran dan doa yang telah dipanjatkan dan diberikan tanpa batas. Terima kasih telah merawatku dengan kelembutan. Terima kasih telah mengajarkanku akan indahny kesederhanaan dalam menjalani hidup. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini atas kerasnya hidup, pentingnya mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu hingga akhir, serta finansial yang tak terhingga sehingga mampu membuatku berdiri, tersenyum, menggenggam, dan merangkul bahu kalian dengan toga yang telah terpasang di atas kepalaku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga sepasang malaikat dan penyemangat hidupku dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan (Aamiin Ya Rabbal Alamin)
12. Kakak-kakakku tersayang, Uwo Emaliya Safithri, Odo Apriansyah, Abang Iparku Adityawan, serta malaikat kecilku, keponakan tersayang M. Jalal Rafif Aditya. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan bantuannya selama ini baik moril, dana maupun asupan makanan selama proses menyelesaikan

kuliah. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan semasa hidupku. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat hidupku

13. Teristimewa *partner* terbaik dan tersabar Sangaji Maulana atas bantuan, masukan, motivasi dan nasihat yang selalu diberikan kepadaku selama ini. Terima kasih selalu sabar menghadapi sikapku yang *moodyan*. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang begitu banyak. Terima kasih telah menjadi sosok ayah, sahabat dan pasangan yang baik yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh dan kesahku. Terima kasih telah menghadirkan keceriaan, mengajarkanku arti kesabaran dan menjadikanku sebagai sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah SWT
14. Teman-temanku tersayang Aisha Sabina (Asab), Masyitoh Istiqomah, Viuly Amara Putri, Bella Meika Lestari, Savira Nur Aini, Aulia Yusro Sari, Rika Selvina Sari, Fangirl WayV Audry Jihaan Afiifah dan Putri Nur Pratama yang selalu memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta menyediakan tempat untuk peneliti beristirahat, terima kasih atas kebersamaannya selama proses pendidikan ini, terima kasih telah menghadirkan keceriaan, terima kasih telah menjadi sosok pelengkap dan penolong dalam hidupku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sukses dan diperlancar di segala urusannya, serta dapat berkumpul kembali kelak bersama di Jannah Allah SWT
15. Teman-teman terkeren Lifti Indriyani, Vivi Karina dan Royadi yang selalu menyemangati peneliti sehingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah hadir, mengajarkanku arti indahnya kebersamaan dan memberikan keceriaan dalam hidupku. Terima kasih karena selalu ingat untuk memberikan kabar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sukses dan diperlancar di segala urusannya, serta dapat berkumpul kembali kelak bersama di Jannah Allah SWT
16. Sahabat terbaikku Febria Tiara dan Tika Destiana yang telah mengajarkanku arti indahnya kebersamaan, yang telah memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku. Terima kasih telah hadir sebagai sosok yang istimewa dan tak lupa selalu memberikan kabar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah

SWT, sukses dan diperlancar di segala urusannya, serta dapat berkumpul kembali kelak bersama di Jannah Allah SWT

17. Teman-teman S1 Ilmu Administrasi Negara Tahun 2017 yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini
18. Teman-teman KKN, ibu dan bapak, serta seluruh pihak yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan arti kebersamaan serta pentingnya koordinasi di Desa Bujung Buring Baru dan di PT Lampung Jasa Utama

Semoga bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari penyampaian maupun kelengkapannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 23 November 2021
Peneliti,



Rizki Astuti
NPM 1716041064

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Praktis	8
1.4.2. Manfaat Akademik	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Konsep Tentang Kinerja Organisasi	12
2.2.1. Konsep Organisasi	12
2.2.2. Konsep Kinerja Organisasi	15
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.....	17
2.2.4. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi	19
2.2.5. Tujuan Pengukuran Kinerja Organisasi	23
2.3. Konsep Tentang Penanggulangan Bencana	23
2.3.1. Konsep Penanggulangan Bencana	23
2.3.2. Konsep Komunikasi Manajemen Bencana	27
2.3.3. Konsep Diseminasi Informasi.....	28
2.3.4. Konsep Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.....	30
2.4. Konsep Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus	31
2.5. Kerangka Pikiran	34

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Tipe Penelitian	38
3.3. Fokus Penelitian.....	39
3.4. Lokasi Penelitian.....	40
3.5. Sumber Data.....	41
3.6. Instrumen Penelitian	44
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.8. Teknik Analisis Data.....	46
3.9. Teknik Keabsahan Data	47

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Tanggamus	50
4.1.1. Profil BPBD Kabupaten Tanggamus.....	50
4.1.2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Tanggamus	51
4.1.3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus.....	52
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanggamus	53
4.1.5. Renstra BPBD Kabupaten Tanggamus.....	59
4.1.6. Arti Simbol SOP dalam <i>Flowchart</i>	62
4.2. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Madang	63
4.3. Gambaran Umum Kelurahan Baros	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	66
5.1.1. Aspek Tujuan.....	66
5.1.2. Aspek Standar	73
5.1.3. Aspek Kelengkapan Peralatan	80
5.1.4. Aspek Kompetensi Aparatur.....	91
5.1.5. Aspek Motif	96
5.1.6. Aspek Peluang	97
5.1.7. Aspek Umpan Balik.....	103
5.2. Pembahasan Penelitian.....	105
5.2.1. Aspek Tujuan.....	106
5.2.2. Aspek Standar	111
5.2.3. Aspek Kelengkapan Peralatan	114
5.2.4. Aspek Kompetensi Aparatur.....	117
5.2.5. Aspek Motif	120
5.2.6. Aspek Peluang	123
5.2.7. Aspek Umpan Balik.....	128

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	131
6.2. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
2. Informan Penelitian.....	42
3. Dasar Hukum Pembentukan OPD.....	50
4. Program Pencegahan dan mitigasi	108
5. Program Kesiapsiagaan.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Siklus Pengelolaan Bencana	24
2. Kerangka Pikiran.....	37
3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus	53
4. Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Madang	64
5. Struktur Organisasi Kelurahan Baros.....	65
6. Sekolah Kebencanaan di Kelurahan Pasar Madang.....	67
7. Sekolah Kebencanaan di Kelurahan Baros	68
8. SOP Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis dan Fasilitas Koordinasi Pencegahan Kebencanaan	74
9. SOP Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis Pencegahan	74
10. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Standarisasi dan Prosedur Tetap.....	75
11. SOP Koordinasi Fasilitas Pencegahan dengan Instansi Terkait.....	75
12. SOP Penyiapan Bahan Pencegahan Bencana.....	76
13. SOP Penyiapan Bahan Pelaporan, Evaluasi Kegiatan, dan Telaahan Staf	77
14. Sirine Penanda akan Terjadinya Tsunami yang Terpasang di Taman Kota ...	82
15. Rambu-rambu Jalur Evakuasi di Kelurahan Pasar Madang.....	82
16. Rambu-rambu Jalur Evakuasi di Kelurahan Baros	83
17. Tempat Evakuasi Sementara di Kelurahan Baros	83
18. Tempat Evakuasi Sementara di Taman Kota	84
19. Tempat Evakuasi Sementara di Lapangan Hijau, Kelurahan Kuripan	84
20. Tempat Evakuasi Sementara di <i>Islamic Center</i>	85
21. Pelatihan Gabungan Anggota Destana Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Baros	98

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian ke BPBD Kabupaten Tanggamus
2. Surat Izin Penelitian ke Kelurahan Pasar Madang
3. Surat Izin Penelitian ke Kelurahan Baros
4. Surat Perizinan Penelitian dari BAPPELITBANG Kabupaten Tanggamus
5. Surat Perizinan Penelitian dari Kecamatan Kotaagung
6. Surat Perizinan Penelitian dari BPBD Kabupaten Tanggamus
7. Surat Perizinan Penelitian dari Kelurahan Pasar Madang
8. Surat Perizinan Penelitian dari Kelurahan Baros
9. *Membercheck* Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanggamus
10. *Membercheck* Lurah Pasar Madang
11. *Membercheck* Sekretaris Lurah Baros
12. *Membercheck* Ketua Destana Kelurahan Pasar Madang
13. *Membercheck* Ketua Destana Kelurahan Baros
14. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Pasar Madang (Topik D.)
15. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Pasar Madang (Sahroni)
16. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Pasar Madang (Yanto)
17. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Baros (Ice Oktaria)
18. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Baros (Acok Daeng Masiga)
19. *Membercheck* Masyarakat Kelurahan Baros (Asiyah)
20. Panduan Wawancara
21. Tabel Triangulasi Penelitian
22. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus
23. Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Madang
24. Struktur Organisasi Kelurahan Baros
25. SOP BPBD Kabupaten Tanggamus Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
26. Dokumentasi dan Hasil Observasi Peneliti

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah negara yang rawan akan kejadian bencana. Hal ini telah dibahas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2018. Apabila dilihat dari ancaman bahaya bencana, Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 35 negara dengan risiko kematian tertinggi dunia. Pernyataan tersebut didukung oleh *United Nation International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR dalam Tamitiadini, 2019). Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban terbanyak di dunia dalam kasus bencana tsunami dan tanah longsor (BNPB dalam Tamitiadini, 2019).

Bencana memiliki bermacam-macam jenis antara lain bencana hidrometeorologi (banjir) dan bencana geologi (bencana tsunami, gempa bumi, tanah longsor). Menurut Malik, tsunami yaitu sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung api meletus, atau hantaman meteor di laut (Sarapang, 2019). Tsunami pula terdapat di dalam peraturan BNPB No. 8 Tahun 2011. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2016) terlihat bahwa kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2005-2015 adalah 78% (11.648) merupakan bencana hidrometeorologi dan 22% merupakan bencana geologi. Penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tsunami tertinggi di Lampung. Wilayah Kotaagung masih termasuk bagian pegunungan busur belakang (*back arc*) dari rangkaian

pegunungan Bukit Barisan yang terbentuk akibat adanya aktivitas subduksi lempeng tektonik aktif Samudra Hindia-Australia terhadap lempeng Eurasia di sebelah barat. Pada tahun 2003 wilayah Kotaagung Timur dan Limau pernah mengalami gempa. Gempa yang terjadi ini berlangsung hingga puluhan kali sehari dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tanggamus dilalui oleh 3 (tiga) sumber potensi bencana tsunami berdasarkan jalur patahan lempeng bumi dimana terdapat 3 (tiga) sumber potensi ini meliputi jalur subduksi atau lempeng benua Indo Australia-Eurasia, Patahan Bukit Barisan, serta potensi volkano tsunami dari Gunung Anak Krakatau (Umarali dalam Hutagalung, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan pasal 36 mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus adalah melalui pembentukan kelurahan/desa siaga bencana dan kelurahan/desa tangguh bencana di desa dan kelurahan dengan risiko bencana tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terkait fungsi dan tugas BPBD dan BNPB sebagai badan penyelenggara penanggulangan bencana daerah dan nasional. BPBD dan BNPB mengandalkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan masyarakat terkait kebencanaan yang dilaksanakan secara terorganisir. Mereka menggunakan sumber dayanya sendiri untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. BPBD memiliki sebuah program penanggulangan bencana berbasis komunitas atau masyarakat di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yaitu program kelurahan/desa tangguh bencana (destana). Program desa tangguh bencana (destana) di Tanggamus terdapat di 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu di Desa Datarajan, Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Baros.

Pengembangan kelurahan/desa tangguh bencana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis penanggulangan bencana, meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli (Prastika, 2020).

Secara garis besar, desa/kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut aspek yang pertama adalah aspek legislasi yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa, aspek kedua adalah perencanaan yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana desa; rencana kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan rencana aksi pengurangan risiko bencana komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan). Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) merupakan salah satu kegiatan dari BPBD pendukung program destana dimana melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Bencana merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya 1 (satu) institusi saja melainkan tanggung jawab bersama untuk menekan dampak atau risiko tingginya kerusakan dan angka kematian. Masyarakat akan pasti akan menyalahkan institusi apabila hal-hal tidak diinginkan terjadi. Komunikasi dalam melakukan penanggulangan bencana tsunami di

Kabupaten Tanggamus sangat diperlukan antara BPBD Kabupaten Tanggamus, desa tangguh bencana (destana), dan masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi *miscommunication*.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset peneliti bersama BPBD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 23 Desember 2020 menyatakan bahwa sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri, masyarakat menyatakan bahwa sudah sekian tahun tidak adanya bencana itu. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021, peneliti melakukan wawancara bersama Ketua Destana Kelurahan Pasar Madang dan mendapatkan hasil sebagai berikut Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang rawan bencana dan berpotensi tinggi terjadinya bencana tsunami karena dilalui oleh 3 (tiga) sumber potensi bencana tsunami berdasarkan jalur patahan lempeng bumi dimana terdapat 3 (tiga) sumber potensi ini meliputi jalur subduksi atau lempeng benua Indo Australia-Eurasia, Patahan Semangko yang membentuk Patahan Bukit Barisan, serta potensi volkano tsunami dari Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan penelitian dari BMKG Patahan Semangko itu terdapat di muka Teluk Semangka. Apabila patahan tersebut penuh dan terjadi gempa bumi maka akan terjadi gelombang tinggi yang akan menyebabkan tsunami setinggi 12 meter atau dapat dikatakan sampai hingga Taman Kota Kotaagung bahkan diperkirakan akan sama dengan kejadian meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 bahkan bisa melebihi itu.

Ketua Destana Kelurahan Pasar Madang menyatakan pula bahwa Kelurahan Baros dan Kelurahan Pasar Madang terletak di muka peti Teluk Semangka. Oleh sebab itu, pihak BPBD Kabupaten Tanggamus memilih desa kami sebagai salah satu desa yang menjalankan program destana (desa tangguh bencana). Selama ini kami telah menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah BPBD Kabupaten Tanggamus dan BMKG Provinsi Lampung berikan melalui sosialisasi dan melakukan simulasi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada masyarakat mengenai tanda-tanda terjadinya

tsunami, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ke arah mana masyarakat harus pergi, dan lain-lain. Akan tetapi, selama pandemi *covid-19* ini hal tersebut tidak dilakukan. Masyarakat sangat menerima, bersyukur, berterima kasih terutama kepada Pemerintah Daerah melalui kelurahan dengan adanya sosialisasi dan simulasi bencana tersebut. Beliau pula menyatakan bahwa Kelurahan Pasar Madang telah menyiapkan *shelter* (tempat perkumpulan) sementara sebelum akhirnya masyarakat dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, hingga saat ini belum adanya *shelter* (tempat perkumpulan) utama seperti yang ada di Aceh serta belum adanya tenda dan dapur umum untuk desa tangguh bencana itu sendiri.

Ketua Destana Kelurahan Pasar Madang menyatakan pula bahwa sirine penanda tsunami pertama di Lampung berada di Tanggamus terletak di Taman Kota Kotaagung, selain itu sirine tsunami lainnya terdapat di Lampung Barat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Kabupaten Tanggamus bahkan masyarakat Kotaagung itu sendiri yang tidak mengetahui keberadaannya sirine penanda tsunami tersebut karena minimnya pemberitahuan. Pihak BPBD tidak menyebarkan spanduk-spanduk ataupun pembuatan film yang berisikan tentang dampak-dampak kronologis alam yang ada di Teluk Semangka di daerah pantai dan permukiman ramai.

Diseminasi informasi merupakan suatu kegiatan bagian dalam proses komunikasi bencana yang panjang. Perlu adanya rancangan yang benar terhadap penyebaran informasi yang dilakukan oleh unsur pelaksana dalam melakukan diseminasi informasi mitigasi bencana pada publik atau masyarakat. Diseminasi informasi tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu yang berkaitan tentang kebencanaan, namun juga merupakan wujud transparansi kinerja dan sebagai prasarana pendorong publik turut serta berkontribusi terhadap penanganan bencana yang ada (Darmasetiadi, 2019).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa menjadi salah satu landasan dalam menangani bencana, institusi pemerintah dan entitas lain yang peduli terhadap penanganan bencana selayaknya juga memperhatikan karakteristik di kawasan bencana alam maupun bencana sosial lainnya.

Menurut Chamsah (Susanto, 2011) dalam menyikapi kompleksitas bencana di Indonesia harus ditangani oleh semua pihak yang secara formal sebagai penanggung jawab kejadian yang berhubungan dengan bencana alam dan bencana sosial lainnya. Institusi pemerintah harus berperan sebagai poros informasi bencana yang bisa dipercaya oleh semua pihak. Secara substansial, negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman dalam pencegahan bencana, penanganan bencana darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan menginformasikan peta rawan bencana maupun prosedur penanganan bencana kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut menurut Susanto (2011) harus diimplementasikan dalam mengintegrasikan informasi dan tindakan nyata dalam kondisi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana oleh unsur pelaksana penanggulangan bencana. Berdasarkan kondisi di atas, peneliti akan menitikberatkan pada upaya BPBD untuk mewujudkan optimalisasi diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus sudah optimal atau belum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kinerja BPBD dalam upaya pelaksanaan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus?
2. Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja BPBD dalam upaya pelaksanaan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus
2. Untuk memperoleh pengetahuan tentang upaya BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi khususnya bagi peneliti, pihak BPBD serta segala pihak pada umumnya yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

1.4.2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara dan menambah penelitian mengenai optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, serta penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dan membantu penelitian dalam memposisikan penelitian. Berikut referensi yang peneliti gunakan dapat dilihat pada tabel 1 (satu).

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Doni Darmasetiadi (2019), Universitas Respati Yogyakarta	Optimalisasi Diseminasi Informasi Pada Mitigasi Bencana	Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana alam. Hal ini memerlukan suatu diseminasi informasi yang tepat kepada publik, yakni masyarakat Indonesia. Namun, penerapan diseminasi ini tidak boleh sembarangan dan perlu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana dan Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Proses ini memerlukan pemahaman bahwa	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini fokus pada optimalisasi diseminasi informasi pada mitigasi bencana Sedangkan fokus peneliti sendiri yaitu berada pada optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus serta peneliti menggunakan teori dari

			<p>proses diseminasi informasi kebencanaan merupakan bagian dari komunikasi krisis kebencanaan yang terjadi pada pra dan pasca bencana. Penerapan diseminasi agar optimal dapat mengadopsi teori pemasaran modern, yakni penerapan Teori STP, dimana menerapkan <i>Segmentatin</i>, <i>Targeting</i>, dan <i>Positioning</i> dalam proses penyebarannya. Tujuannya agar mengoptimalkan penyeberapan informasi dengan menekankan kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok publik.</p>	Wibowo (Marjaya, 2019)
2	Fendi Irawan Sirapati (2015), Universitas Mulawarman	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana korban banjir cukup baik dimana <i>team</i> regu penyelamat BPBD tetap berkoordinir, bekerja sama dengan instansi pemerintah lainya serta perusahaan-perusahaan yang ada disekitar Kampung Lambing. BPBD juga tetap melakukan kerja sama dengan semua masyarakat sekitar korban banjir atas bencana yang dihadapi sebagai salah satu tujuannya untuk meningkatkan kerja sama antara pihak instansi pemerintah dan perusahaan serta masyarakat sekitar banjir agar tercapainya sinergi dibutuhkan kerja sama.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini fokus pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Sedangkan fokus peneliti sendiri yaitu berada pada optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana

				tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.
3	Nur Khotimah Suri (2015), Universitas Sumatera Utara	Analisa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo menggunakan analisis swot masih sangat tergolong baru dalam struktur pemerintah Kabupaten Karo, sehingga kinerja BPBD Kabupaten Karo belum terlihat baik karena masih banyak terdapat masalah-masalah dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung. Meskipun demikian BPBD Kabupaten Karo telah memiliki peta rawan bencana khusus di Kabupaten Karo yang dapat membantu kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam mengantisipasi dan mengevakuasi bila bencana datang.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini fokus pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo Sedangkan fokus peneliti sendiri yaitu berada pada optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

2.2. Konsep Tentang Kinerja Organisasi

2.2.1. Konsep Organisasi

Menurut Hasibuan (Jamil, 2016) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wiley (Pratama, 2019) yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan falsafah *man behind the gun* yaitu roda organisasi sangat tergantung pada perilaku-perilaku manusia yang bekerja di dalamnya. Pendapat dari Wiley (Pratama, 2019) diperkuat oleh pendapat dari Husnan (2012), guna mencapai tujuan organisasi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang berkualitas yang mampu menyumbangkan segenap daya upaya dalam rangka melayani kebutuhan publik dan memajukan organisasi tempat dia bekerja.

Perilaku kontributif pada pencapaian kinerja yang baik menjadi perhatian organisasi dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak hanya dengan kemampuan, situasi, perilaku, metode dan berbagai faktor eksternal individu yang bisa dikendalikan, tetapi ada faktor internal individu berupa *individual difference* yang mampu mempengaruhi kinerja organisasi yaitu motivasi, kecerdasan, konsep diri dan kendala situasional (Anderson dalam Hasbullah, 2018). Menurut Barata (2014) kompetensi aparatur adalah kemampuan, kehandalan, pengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Sejalan dengan pendapat dari Barata (2014), Mitchell (Jamil, 2016) pun menyatakan bahwa kinerja aparatur ditentukan oleh kemampuan dan motivasi, kemampuan tanpa motivasi belum tentu dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

Motivasi menurut Hasibuan (2011) adalah sebagai suatu sarana perangsang atau pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para

pekerja agar pada diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. Menurut Hasibuan (2011) seorang pegawai akan berkinerja dengan baik dan memiliki motivasi kerja yang tinggi jika hasil kerjanya diakui dan dihargai oleh atasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Siagian (2014) yang menyatakan bahwa selain uang, secara psikologis, seorang pegawai atau aparaturnya menginginkan pengakuan yang memadai akan hasil kerjanya. Sejalan dengan Siagian, Mesran (2018) juga menyatakan bahwa mendapatkan penghargaan atas prestasi karena kerja kerasnya merupakan suatu kebanggaan tersendiri, tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang bekerja keras untuk mengejar prestasi karena dengan prestasi akan membuka jalan untuk mengembangkan karirnya.

Pernyataan di atas pun diperjelas oleh Nitisemito (2012) yang menyatakan bahwa memotivasi kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cara pemberian *reward and punishment*. Menurut Fortunisa (2018) penerapan *reward* dan *punishment* secara konsekuen dapat membawa pengaruh positif antara lain:

1. Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisasi menjadi lebih baik karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas
2. Kinerja individu dalam suatu organisasi semakin meningkat karena adanya sistem pengawasan yang objektif dan tepat sasaran
3. Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi

Fungsi atau tujuan penting dari *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) bagi suatu organisasi menurut Handoko (Destiani, 2019) yaitu:

1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi
2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih
3. Bersifat mendidik
4. Menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan

Menurut Karsano (Budiono, 2016) salah satu yang mempengaruhi kinerja adalah tingkat dimana seseorang merasa komit dengan suatu tujuan.

Adanya komitmen yang tinggi, semua komponen yang terlibat dalam suatu organisasi akan lebih menghargai organisasi itu sendiri dengan bersikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam organisasi. Menurut Mathis dan Jackson (Budiono, 2016) komitmen organisasi adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Komitmen organisasi sendiri merupakan keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Meyer (Budiono, 2016) komponen komitmen organisasi ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Affective commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional
2. *Continuance commitment*, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain
3. *Normative commitment*, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan

Sejalan dengan adanya komitmen dalam organisasi, Hasibuan (2011) mengatakan bahwa untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pengembangan pegawai yang memadai sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan pengembangan SDM ini adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai, dengan adanya pengembangan SDM diharapkan dapat memperbaiki pengetahuan, keterampilan, serta memperbaiki sikap pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Menurut Irene (2016)

umpan balik suatu organisasi berkenaan dengan monitoring apakah terjadi deviasi antara rencana dengan pelaksanaan dan memprediksi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kreitner (Irene, 2016) umpan balik yang baik antara lain:

1. Menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang jelas
2. Memberikan umpan balik secara spesifik
3. Menghubungkan umpan balik pada bidang yang menjadi hasil utama
4. Memberikan umpan balik sesegera mungkin
5. Memberikan umpan balik positif untuk perbaikan proses kinerja, informasi yang akurat dan kredibel

Menurut Irene (2016) terdapat penyebab kegagalan atau kesalahan dalam melakukan umpan balik yaitu:

1. Umpan balik digunakan untuk menghukum, menjatuhkan karyawan
2. Penerima umpan balik merasa tidak relevan dengan pekerjaannya
3. Informasi umpan balik diterima lambat
4. Keluhan pekerja karena harus mengumpulkan dan mencatat umpan balik
5. Informasi umpan balik terlalu kompleks dan sulit dipahami

Faktor yang mempengaruhi reaksi aparatur terhadap umpan balik menurut Keeping (Zumria, 2019) antara lain:

1. Kepuasan terhadap umpan balik
2. Adanya manfaat yang dirasakan
3. Umpan balik diterima dan dirasa akurat dan tepat

2.2.2. Konsep Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau tidak, sehingga langkah-langkah yang digunakan untuk mewakili kinerja dipilih berdasarkan keadaan organisasi

yang sedang diamati (Puryantini *et al*, 2017). Sedangkan Mangkunegara (2017) menjelaskan kinerja secara lebih luas yaitu kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut peneliti, pendapat di atas masih kurang lengkap karena hanya membahas pengertian kinerja secara singkat dan luas tanpa mengetahui indikator apa yang akan diukur di akhir periode. Sehingga peneliti mengemukakan pendapat lain dari beberapa ahli.

Kinerja organisasi saat ini tidak selalu berhubungan dengan nilai finansial yang dicapai pada akhir periode dalam usaha organisasi (Suryani, 2018). Kinerja organisasi menurut Sobandi (Julianry *et al*, 2017) merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact*. Pendapat dari kedua ahli di atas dinilai masih kurang lengkap karena tidak membahas indikator apa yang akan diukur di akhir periode. Sehingga peneliti mengemukakan pendapat lain dari beberapa ahli.

Menurut Byremo (2015) kinerja organisasi adalah hasil akhir yang dicapai pada kinerja keuangan, kinerja pasar, kinerja operasional dan kinerja karyawan. Pendapat di atas lebih tertuju pada bidang bisnis karena terdapat indikator mengenai kinerja pasar. Sedangkan Menurut Quansah (2013) kinerja organisasi adalah hasil akhir organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pendapat ini lebih terarah dan lebih jelas karena telah menentukan dari awal kriteria atau indikator yang akan diukur di akhir periode.

Pendapat menurut Julianry *et al* (2017) menurut peneliti telah mencakup segala aspeknya yaitu kinerja organisasi diperlukan untuk memahami dan meningkatkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang optimal *good corporate governance* (GCG). Pendapat ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Quansah yaitu terletak pada indikator yang akan diukur

di akhir periode yaitu sasaran dan tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya kata kinerja dalam kinerja organisasi berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja) yaitu hasil kerja suatu organisasi yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai dan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Sehingga mampu mengetahui keoptimalan kinerja organisasi selama satu periode.

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Berikut ini terdapat beberapa pendapat menurut para ahli yang akan peneliti kemukakan. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran kinerja menurut Keith dan Newstrom (Julianry *et al*, 2017) ada 2 (dua) yaitu:

1. Faktor kemampuan (*ability*)
2. Faktor motivasi (*motivation*)

Selanjutnya, pendapat menurut Hasibuan (2012) faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3 (tiga) dan pendapat ini sama dengan pendapat Keith dan Newstrom. Akan tetapi, ada 1 (satu) tambahan faktor pembeda antara lain:

1. Kemampuan dan minat seorang pekerja
2. Kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran
3. Tingkat motivasi pekerja

Pendapat selanjutnya yaitu menurut Harsuko (Daulay, 2019) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3 (tiga) yaitu:

1. Sikap (*attitude*)
2. Kemampuan (*ability*)
3. Prestasi (*accomplishment*)

Pendapat menurut Harsuko hanya terdapat 1 (satu) faktor yang sama dengan pendapat dari Keith dan Newstrom serta Hasibuan (2012) yaitu pada faktor kemampuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran kinerja menurut Quansah (2013) ada 2 (dua) yaitu:

1. Tujuan
2. Sasaran yang direncanakan

Pendapat dari Quansah (2013) berbeda dengan ketiga pendapat di atas dan lebih mengarah kepada visi dan misi organisasi. Sedangkan pendapat menurut As'ad (Daulay, 2019) faktor yang mempengaruhi kinerja ada 4 (empat) yaitu:

1. Kualitas, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketetapan dalam melakukan tugas
2. Kuantitas, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan
3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya

Berdasarkan kelima pendapat di atas, peneliti menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dilihat dari:

1. Faktor kemampuan
2. Faktor motivasi
3. Faktor kemampuan menerima tugas dan peran
4. Faktor sikap
5. Faktor prestasi
6. Faktor tujuan
7. Faktor sasaran
8. Faktor kualitas
9. Faktor kuantitas
10. Faktor waktu kerja
11. Faktor kerja sama

2.2.4. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi

Kinerja sebuah organisasi tidak dapat dicapai hanya dari sisi internal saja namun telah terbukti pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang berperan menciptakan keberhasilan maupun kegagalannya. Berikut ini terdapat beberapa indikator pengukur kinerja organisasi menurut para ahli.

Indikator kinerja organisasi menurut Wibowo (Marjaya, 2019) ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Tujuan

Merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai tanpa standar. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan.

3. Kelengkapan Peralatan

Merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Kelengkapan peralatan merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan.

4. Kompetensi

Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

5. Motif

Merupakan alasan atau mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

6. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya.

7. Umpan Balik

Umpan balik antar tujuan, standar bersifat saling berkaitan. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Pendapat di atas menurut peneliti sudah cukup lengkap dan menyeluruh. Sehingga mampu digunakan oleh peneliti untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus. Sedangkan kinerja organisasi yang diukur oleh Byremo (2015) ada 4 (empat) yaitu:

1. *Financial*
2. *Market share*
3. *Operational*
4. *Employee performance*

Pendapat Byremo (2015) sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton. Kaplan dan Norton (Puryantini *et al*, 2017) memperkenalkan *balanced scorecard* yang menekankan pada semua ukuran finansial dan non finansial menjadi bagian sistem informasi untuk para pekerja di semua tingkatan yang ada dalam organisasi. Indikator dari *balanced scorecard* ada 4 (empat) yaitu:

1. Perspektif finansial atau non-finansial
2. Perspektif pelanggan
3. Perspektif proses operasional
4. Perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan

Pendapat Byremo (2015) serta Kaplan dan Norton lebih berfokus kepada bidang bisnis. Oleh karena itu, indikator di atas kurang cocok apabila digunakan untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi menurut Sitty (Marjaya, 2019) dapat diukur berdasarkan:

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan tentang pekerjaan
4. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
5. Perencanaan kegiatan

Pendapat di atas menurut peneliti kurang lengkap karena tidak adanya ukuran timbal balik dari perencanaan yang telah dibuat oleh suatu organisasi. Begitu pula dengan pendapat menurut Suryani (2018) terdapat beberapa indikator atau variabel yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya manusia
2. Dukungan manajer lini
3. Keadilan organisasi
4. Efektivitas organisasi dan variabel pemediasi

Selanjutnya, indikator pengukuran kinerja organisasi menurut Levinne (Hardiansyah, 2018) antara lain:

1. *Responsiveness* atau responsivitas, ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan *customers*
2. *Responsibility* atau tanggungjawab, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
3. *Accountability* atau akuntabilitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada

di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders* seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

Pendapat di atas, menurut peneliti masih kurang lengkap karena tidak adanya indikator pengukuran yang dilihat dari tujuan, sasaran, sarana yang digunakan, perencanaannya hingga timbal baliknya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja menurut Wibowo (Marjaya, 2019) karena dianggap lebih lengkap dan lebih cocok untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan indikator di atas, peneliti pula memiliki indikator untuk mengukur keoptimalannya berdasarkan ketujuh indikator pengukur kinerja organisasi antara lain:

1. Berdasarkan aspek tujuan mencakup pengurangan risiko bencana berbasis komunitas
2. Berdasarkan aspek standar mencakup *Standar Operational Procedur* (SOP)
3. Berdasarkan aspek kelengkapan peralatan mencakup:
 1. Kelengkapan peralatan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Alat komunikasi
4. Berdasarkan aspek kompetensi aparatur mencakup kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi dan tugas
5. Berdasarkan aspek motif mencakup:
 1. Motivasi dalam melakukan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Perilaku aparatur
 3. Sosialisasi bencana tsunami
6. Berdasarkan aspek peluang mencakup:
 1. Komunitas masyarakat desa tangguh bencana
 2. Solusi bencana tsunami
 3. Partisipasi masyarakat

7. Berdasarkan aspek umpan balik mencakup:
 1. Pelaporan hasil kegiatan
 2. Penilaian kinerja
 3. Tindak lanjut hasil kegiatan

2.2.5. Tujuan Pengukuran Kinerja Organisasi

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2013) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

2.3. Konsep Tentang Penanggulangan Bencana

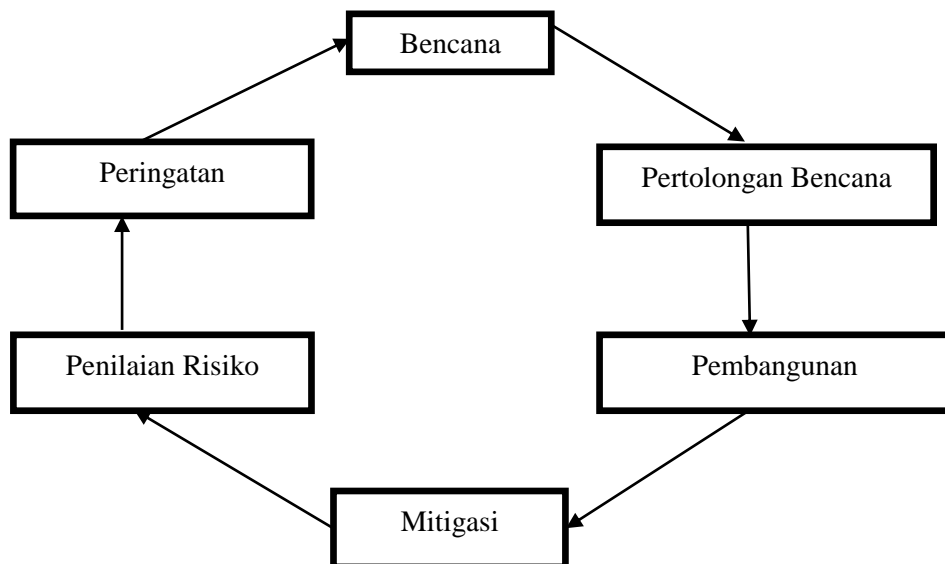
2.3.1. Konsep Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara umum mitigasi yaitu upaya pencegahan, penanggulangan suatu bencana, upaya meminimalisir dampak negatif bencana yang terjadi (Noor, 2014).

Secara umum mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Usaha mitigasi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 (Noor, 2014) tentang

Penanggulangan Bencana yaitu berupa pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. pada saat pra bencana biasanya berupa kesiapsiagaan atau upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk mengantisipasi bencana melalui pemberitahuan atau diseminasi informasi, peningkatan kesiagaan jika terjadi bencana serta langkah-langkah untuk memperkecil dampak dari suatu bencana.

Kesiapsiagaan terhadap suatu bencana merupakan suatu elemen penting dalam mengurangi risiko bencana yang bersifat proaktif atau sebelum terjadinya suatu bencana. Model kesiapsiagaan terhadap suatu bencana dapat kita lihat pada gambar 1 (satu) akan tetapi model ini masih memiliki kelemahan karena kegiatan pengelolaan bencana tersebut tidak berurutan.



Gambar 1. Model Siklus Pengelolaan Bencana
(Sumber: Noor, 2014 diolah oleh peneliti, 2021)

Berikut ini merupakan siklus mitigasi bencana menurut Katada (Yamada, 2011) yaitu:

1. Tahap perencanaan, perencanaan tindakan pencegahan bencana dan rute evakuasi
2. Tahap pelaksanaan, pengenalan instruksi dan rute yang direncanakan

3. Tahap pemeriksaan, melakukan pengamatan dan diagnosis setelah memperkenalkan instruksi yang direncanakan dan rute
4. Tahap evaluasi, penjelasan hasil dan umpan balik tentang instruksi yang direncanakan dan rute

Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan tindakan tanggap darurat yang perlu diketahui oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana menurut Katada (Yamada, 2011) antara lain:

1. Tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana yaitu melakukan peringatan dini (apabila memungkinkan) seperti melindungi/menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan benda berharga seperti dokumen-dokumen penting
2. Tindakan evakuasi yaitu dilakukan apabila bencana itu telah terjadi
3. Tindakan pasca bencana yaitu bantuan SAR, evakuasi korban, menyediakan tempat perlindungan sementara, menyediakan perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan darurat serta perencanaan untuk pemulihan segera terhadap infrastruktur kritis dan sarana sosial seperti sekolah dan tempat ibadah

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ma'arif, 2019). Menurut Parker, bencana merupakan sebuah kejadian alam atau kejadian hasil tangan manusia yang tidak biasa, termasuk kejadian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi yang melemahkan kapasitas respon dari komunitas manusia, kelompok individu atau lingkungan alam dan yang menyebabkan kerusakan besar, kerugian ekonomi, kehancuran, cedera dan kematian (Kusumasari, 2014).

Pada umumnya bencana dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok menurut Nurjanah dkk (2011) antara lain:

1. Bencana geologi, yaitu letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor
2. Bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, badai/angin topan, kekeringan, rob/air laut pasang, kebakaran hutan
3. Bencana biologi, yaitu epidemik, penyakit tanaman/hewan
4. Bencana kegagalan teknologi, yaitu kecelakaan/kegagalan industri, kecelakaan transportasi, kesalahan desain teknologi
5. Bencana lingkungan, yaitu pencemaran, abrasi pantai, kebakaran, kebakaran hutan
6. Bencana sosial, yaitu tawuran, demonstrasi, terorisme, penjarahan, konflik antarsuku

Bencana geologi merupakan hasil dari proses-proses geologi baik yang bersifat endogenik maupun eksogenik dimana proses tersebut tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tsunami menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) merupakan gelombang air laut yang dibangkitkan oleh perubahan permukaan dasar laut akibat sesar, letusan gunung api bawah laut, dan longsor bawah laut. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu *tsu* yang artinya pelabuhan dan *name* yang artinya gelombang. Secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan.

Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km/jam. Ketinggian gelombang di laut dalam hanya sekitar 1 meter. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km/jam. Namun, ketinggian sudah meningkat hingga puluhan meter. Hantaman gelombang tsunami bisa mencapai puluhan kilometer dari bibir pantai. Kerusakan karena tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami (Tihurua, 2017).

Menurut Tihurua (2017) terdapat 5 (lima) hal prioritas kunci yang harus diperhatikan dalam mengurangi risiko bencana yaitu:

1. Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah
2. Melakukan identifikasi, penilaian, pengawasan risiko bencana dan peningkatan terhadap peringatan dini
3. Meningkatkan pengetahuan tentang bencana
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Meningkatkan sikap kewaspadaan terhadap bencana

2.3.2. Konsep Komunikasi Manajemen Bencana

Komunikasi manajemen bencana merupakan suatu konsep dasar dari upaya pembahasan penyebarluasan informasi mengenai kebencanaan. Titik tekan dalam konsep penanganan komunikasi manajemen bencana terletak pada masalah ketidakpastian informasi. Dalam kondisi darurat saat menghadapi suatu bencana biasanya korban bencana mengalami kendala dalam mengakses informasi karena tidak adanya listrik dan internet dan menyebabkan kepanikan yang luar biasa (Darmasetiadi, 2019).

Komunikasi manajemen bencana juga merupakan pemahaman dasar dari proses komunikasi krisis. Menurut Booz *et al*, komunikasi krisis adalah pertukaran informasi keselamatan yang relevan dengan risiko selama situasi darurat. Situasi krisis sebagai peristiwa yang dinamis dan tidak terduga melibatkan ancaman signifikan dan ketidakpastian yang berkelanjutan (*The European Centre for Disease Prevention and Control*). Dalam konteks ini, krisis yang dihadapi berhubungan dengan informasi kepada masyarakat tentang kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana (Collins, 2016).

Menurut Haddow (Darmasetiadi, 2019) terdapat 4 (empat) landasan utama dalam membangun suatu komunikasi bencana yaitu:

1. *Customer fokus*, upaya untuk dapat memahami informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah rawan bencana dan para

relawan. Untuk menjamin aneka informasi yang dibutuhkan, maka harus ada mekanisme dalam berkomunikasi untuk menjamin keakuratan informasi

2. *Leadership commitment*, keberadaan pemimpin yang berkarakter tanggap bencana serta memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
3. *Situational awareness*, proses komunikasi dimana adanya pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi terkait bencana yang dihadapi
4. *Media partnership*, kehadiran media sangat penting dalam menyampaikan informasi terbaru kepada publik

2.3.3. Konsep Diseminasi Informasi

Menurut Echol (Darmasetiadi, 2019) diseminasi adalah penyebaran. Menurut Merse (Darmasetiadi, 2019) diseminasi informasi adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi atau pesan dari pemerintah sebagai komunikator kepada masyarakat. Penyampaian informasi menjadi salah satu faktor penting suksesnya suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009, diseminasi informasi nasional sebagai penyebaran informasi secara timbal balik oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta yang dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan diseminasi informasi menurut Leeuwis (Darmasetiadi, 2019) yaitu:

1. Menentukan dan memahami tujuan dari diseminasi informasi
2. Mengidentifikasi pesan yang akan disampaikan
3. Memahami target atau sasaran
4. Menentukan media yang paling efektif

5. Memotivasi target atau sasaran untuk memberikan tanggapan atau masukan
6. Frekuensi penyampaian pesan
7. Memperhitungkan dampak positif maupun negatif dari suatu informasi

Schramm (Arifin, 2016) mengatakan bahwa diseminasi informasi dapat dikatakan optimal jika:

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat
2. Komunikasi berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator

Dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah yang bertindak sebagai komunikator harus memiliki 3 (tiga) karakteristik sebagaimana yang dikatakan oleh Cangara (2013) yaitu antara lain:

1. Kredibilitas, pemerintah dirasa memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga pesan yang disampaikan menjadi objektif
2. Daya tarik, pemerintah harus memiliki integritas sehingga masyarakat menjadi percaya
3. Kekuasaan, pemerintah perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai kewenangan dibidangnya

Untuk mengoptimalkan strategi dari diseminasi informasi, Siswandi menjelaskan bahwa pemerintah harus berfokus pada 2 (dua) aspek yaitu menerapkan teori STP dan Standar Operasional Pelaksanaan. Teori STP merupakan salah satu inti pembahasan dari pemasaran modern di mana menekankan STP (*Segmentation, Target, and Positioning*) dalam upaya yang memperjelas kebutuhan informasi berdasarkan penerimanya. Tjiptono (2012) menjelaskan *segmentation* dalam hal ini upaya untuk mengelompokkan publik dari informasi kebencanaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai komunikator berkaitan dengan kebutuhan informasi yang ada. Kebutuhan informasi itu pun sangat spesifik dalam bidang kebencanaan.

Tjiptono (2012) menjelaskan mengenai *target*, pemerintah harus dapat menentukan jenis publik yang menjadi prioritas untuk dijadikan target utama dalam penyampaian informasi kebencanaan dengan menjalankan fungsi-fungsi *segmentation*. Kemudian yang terakhir Tjiptono (2012) menjelaskan mengenai *positioning*, dimana usaha pemerintah dalam upaya menyebarluaskan nilai tertentu dalam informasi kebencanaan kepada publik. Penerapan teori STP dalam diseminasi informasi tidak hanya sekedar menyebarluaskan pesan saja namun harus dikemas dengan topik yang berkaitan dengan kebencanaan. Oleh karena itu pemerintah perlu memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai acuan dan mekanisme dalam menentukan konten informasi yang disebarkan dan bentuk kemasannya.

2.3.4. Konsep Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Pemahaman yang kurang tentang bencana menyebabkan masyarakat yang rentan akan lebih berisiko. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan (Paripurno, 2011). Menurut definisi dari UNISDR (Lessy, 2019) makna PRB yaitu sebuah kerangka konseptual dari elemen-elemen yang mengandung kemungkinan dalam mereduksi kerentanan dan bencana di dalam masyarakat atau juga mencegah/menghindari atau membatasi (memitigasi dan upaya kesiapsiagaan) dampak dari ancaman-ancaman dalam konteks yang lebih luas, yakni pembangunan berkelanjutan. Materi ini merupakan hal yang sangat penting mengingat langkah awal dalam membangun suatu pemahaman tentang paradigma pengurangan risiko bencana seharusnya berawal dari peningkatan pemahaman masyarakat atau komunitas.

PRBBK dirasa penting dijadikan sebagai metodologi mengingat urgensitasnya dalam memberdayakan masyarakat dan menangani bencana. Prinsip dasar PRBBK adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap PRB antara lain partisipatif, pemberdayaan, dan demokratik yang bisa sama untuk komunitas tetapi pada level teknis misalnya soal teknik pengkajian dan penilaian, perlu dikembangkan menurut situasi dimasing-masing komunitas (Nugroho, 2011).

2.4. Konsep Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

BPBD sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara

2. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BPBD juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BPBD Kabupaten Tanggamus juga dalam menjalankan tugas memiliki sebuah pedoman atau dapat disebut dengan SOP. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. Kegiatan ini bertujuan antara lain:

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada BPBD Kabuapten Tanggamus;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi;

3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

SOP ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana tugas di lingkungan BPBD Kabupaten Tanggamus. Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD Kabupaten Tanggamus meliputi:

1. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efisien, dan akuntabel
2. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya
3. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang dalam menyelesaikan tugas
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pejabat dan pelaksana tugas serta organisasi secara keseluruhan
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
6. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan
7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana
9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
10. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana tugas dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi

2.5. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir adalah acuan peneliti untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka pikir.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yaitu:

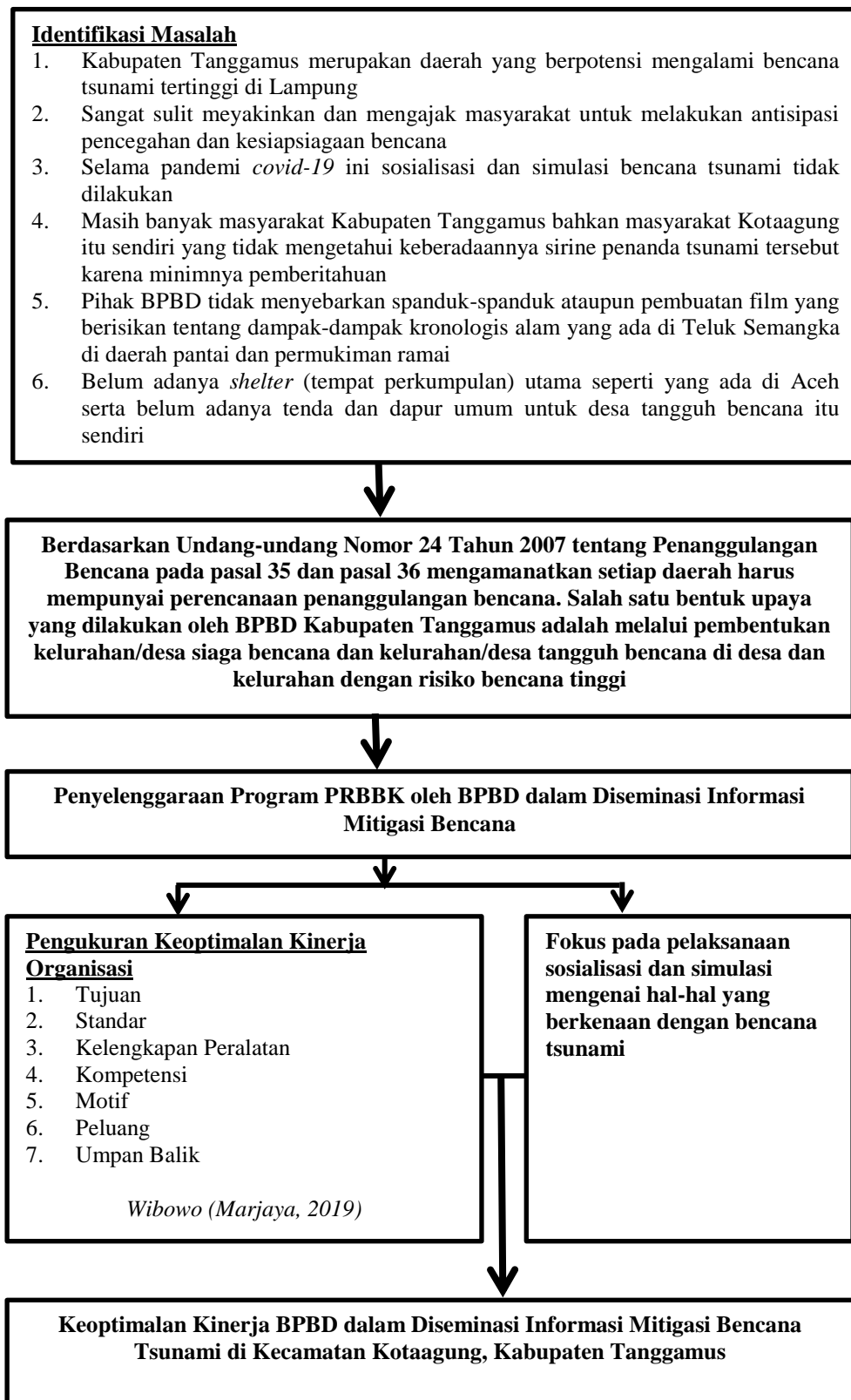
1. Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tsunami tertinggi di Lampung
2. Sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
3. Selama pandemi *covid-19* ini sosialisasi dan simulasi bencana tsunami tidak dilakukan
4. Masih banyak masyarakat Kabupaten Tanggamus bahkan masyarakat Kotaagung itu sendiri yang tidak mengetahui keberadaannya sirine penanda tsunami tersebut karena minimnya pemberitahuan
5. Pihak BPBD tidak menyebarkan spanduk-spanduk ataupun pembuatan film yang berisikan tentang dampak-dampak kronologis alam yang ada di Teluk Semangka di daerah pantai dan permukiman ramai
6. Belum adanya *shelter* (tempat perkumpulan) utama seperti yang ada di Aceh serta belum adanya tenda dan dapur umum untuk desa tangguh bencana itu sendiri

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengukur optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Di bawah ini akan dikemukakan peneliti mengenai indikator pengukur optimalisasi kinerja organisasi yang menjadi titik acuan penelitian berdasarkan teori menurut Wibowo (Marjaya, 2019) ada 7 (tujuh) antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek tujuan mencakup pengurangan risiko bencana berbasis komunitas
2. Berdasarkan aspek standar mencakup *Standar Operational Procedur* (SOP)
3. Berdasarkan aspek kelengkapan peralatan mencakup:
 1. Kelengkapan peralatan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Alat komunikasi
4. Berdasarkan aspek kompetensi aparatur mencakup kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi dan tugas
5. Berdasarkan aspek motif mencakup:
 1. Motivasi dalam melakukan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Perilaku aparatur
 3. Sosialisasi bencana tsunami
6. Berdasarkan aspek peluang mencakup:
 1. Komunitas masyarakat desa tangguh bencana
 2. Solusi bencana tsunami
 3. Partisipasi masyarakat
7. Berdasarkan aspek umpan balik mencakup:
 1. Pelaporan hasil kegiatan
 2. Penilaian kinerja
 3. Tindak lanjut hasil kegiatan

Indikator pengukuran kinerja organisasi yang telah disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada mengenai keoptimalan kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Peneliti pula lebih memfokuskan pelaksanaan sosialisasi dan simulasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan bencana tsunami sebagai upaya yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Tanggamus dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 2 (dua) di bawah ini.



Gambar 2. Kerangka Pikiran
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin menghasilkan data-data berupa kata-kata bukan berupa angka-angka serta landasan teori dapat dimanfaatkan sebagai acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dari segi konsep dan persoalan manusia. Menurut Moleong (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami dan menggambarkan mengenai optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat fenomena yang terjadi terkait optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus secara mendalam. Sesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja serta upaya BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya dengan menetapkan fokus yang jelas, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data apa yang akan dikumpulkan dan data yang tidak perlu digunakan. Berdasarkan dari fokus yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengukur optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Di bawah ini akan dikemukakan peneliti mengenai indikator pengukur optimalisasi kinerja organisasi yang menjadi titik acuan penelitian berdasarkan teori menurut Wibowo (Marjaya, 2019) ada 7 (tujuh) antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan aspek tujuan mencakup pengurangan risiko bencana berbasis komunitas
2. Berdasarkan aspek standar mencakup *Standar Operational Procedur* (SOP)
3. Berdasarkan aspek kelengkapan peralatan mencakup:
 1. Kelengkapan peralatan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Alat komunikasi
4. Berdasarkan aspek kompetensi aparatur mencakup kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi dan tugas

5. Berdasarkan aspek motif mencakup:
 1. Motivasi dalam melakukan diseminasi informasi mitigasi bencana
 2. Perilaku aparatur
 3. Sosialisasi bencana tsunami

6. Berdasarkan aspek peluang mencakup:
 1. Komunitas masyarakat desa tangguh bencana
 2. Solusi bencana tsunami
 3. Partisipasi masyarakat

7. Berdasarkan aspek umpan balik mencakup:
 1. Pelaporan hasil kegiatan
 2. Penilaian kinerja
 3. Tindak lanjut hasil kegiatan

Indikator pengukuran kinerja organisasi yang telah disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada mengenai keoptimalan kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Peneliti pula lebih memfokuskan pelaksanaan sosialisasi dan simulasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan bencana tsunami sebagai upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari subjek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Baros yang berada di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

Peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus dikarenakan Kabupaten Tanggamus merupakan kawasan yang rawan bencana tinggi seperti gempa, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Selain itu, di Kabupaten Tanggamus khususnya Kecamatan Kotaagung merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tsunami tertinggi di Lampung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tanggamus dilalui oleh 3 (tiga) sumber potensi bencana tsunami berdasarkan jalur patahan lempeng bumi dimana terdapat 3 (tiga) sumber potensi ini meliputi jalur subduksi atau lempeng benua Indo Australia-Eurasia, Patahan Bukit Barisan, serta potensi volkano tsunami dari Gunung Anak Krakatau.

3.5. Sumber Data

Definisi data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya (Moleong, 2016). Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara dan observasi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi.

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil observasi maupun wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan. Teknik penarikan sampel ini berorientasi pada pemilihan sampel dengan populasi dan tujuan spesifik dari penelitian yang diketahui oleh peneliti sejak awal (Sugiyono, 2017).

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai optimalisasi kinerja BPBD dalam

diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Informan	Informasi
1	Sismantoro, S.T., M.M.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanggamus	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Motif, Aspek Peluang Program Destana, Aspek Umpan Balik
2	Dede Candra, S.IP.	Lurah Kelurahan Pasar Madang	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana, Aspek Umpan Balik
3	Mega Sari, S.E.	Sekretaris Lurah Kelurahan Baros	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana, Aspek Umpan Balik
4	Iskandar Zulkarnain	Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Pasar Madang	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana, Aspek Umpan Balik

5	Sujana Salim	Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Baros	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana, Aspek Umpan Balik
6	Topik D.	Masyarakat Kelurahan Pasar Madang	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana
7	Sahroni	Masyarakat Kelurahan Pasar Madang	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana
8	Yanto	Masyarakat Kelurahan Pasar Madang	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana
9	Ice Oktaria	Masyarakat Kelurahan Baros	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana
10	Acok Daeng Masiga	Masyarakat Kelurahan Baros	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur,

			Aspek Peluang Program Destana
11	Asiyah	Masyarakat Kelurahan Baros	Mengenai Aspek Tujuan Kegiatan PRBBK, Aspek SOP Kegiatan PRBBK, Aspek Kelengkapan Peralatan, Aspek Kompetensi Aparatur, Aspek Peluang Program Destana

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung berupa dokumen, arsip dan catatan yang diberikan kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yaitu catatan atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian digunakan untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan yang berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan informan. Maka kompetensi peneliti mengenai topik yang akan diteliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Adapun hal dilakukan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan peran aktif dari peneliti, selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat terbuka dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, *tape recorder*, pena, dan lain-lain).

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yakni:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Baros terkait optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2016) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan beberapa informan. Adapun informan yang diwawancarai peneliti antara lain Pihak BPBD Kabupaten Tanggamus, Lurah Kelurahan Pasar Madang, Sekretaris Lurah Kelurahan Baros, Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Pasar Madang, Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Baros, Masyarakat Kelurahan Pasar Madang, Masyarakat Kelurahan Baros.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat berupa foto, tulisan, gambar, dan sebagainya.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan sampai pada akhir penelitian dengan berinteraksi langsung di lokasi dengan informan dalam rangka pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja. Oleh karena itu, hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data berbentuk berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antarkategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman (Sugiyono, 2012) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan pola atau kegiatan yang telah dilakukan melalui gambaran dalam penyajian data, gambaran utuh tentang fenomena yang telah diteliti. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dari fenomena tersebut.

3.9. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) (Sugiyono, 2017). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut kriteria menurut Sugiyono (2017) dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang ada. Sehingga peneliti mampu mendeskripsikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif (masih dapat berubah).

2. *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid. Sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data. Maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila

perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada 3 (tiga) macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait seperti Pihak BPBD Kabupaten Tanggamus, Lurah Kelurahan Pasar Madang, Sekretaris Lurah Kelurahan Baros, Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Pasar Madang, Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Baros, Masyarakat Kelurahan Pasar Madang, Masyarakat Kelurahan Baros.
2. Triangulasi teknik meliputi pengecekan data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan melalui wawancara dengan pertanyaan yang sama. Akan tetapi, dengan menyesuaikan kemampuan informan dalam memberikan data yang dicari oleh peneliti.
3. Triangulasi waktu yakni pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain untuk pengecekan dalam waktu dan situasi yang berbeda. Pada tahap ini, peneliti akan turun langsung melakukan observasi di lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dan mengklarifikasi data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang menjadi sumber data primer. Sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid untuk membantu dalam menganalisis dan

mengambil kesimpulan terkait dengan optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Tanggamus

4.1.1. Profil BPBD Kabupaten Tanggamus

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1986/SJ hal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus diamanatkan pada kesempatan pertama lembaga yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati tersebut ditata dalam peraturan Daerah. Berikut ini akan peneliti paparkan dasar hukum pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) berikut.

Tabel 3. Dasar Hukum Pembentukan OPD

No	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1	Peraturan Daerah	Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus
2	Peraturan Pemerintah	Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus
3	Peraturan Pemerintah	Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4	Peraturan Presiden	Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana
5	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus	Nomor 03 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29

Sumber: Arsip Dokumen LKIP BPBD Kabupaten Tanggamus (2019)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus beralamat di Jl. Jend. A. Yani, Kp. Baru, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384 yang terdiri dari 1 lantai dengan 5 ruangan kerja dan 2 gudang.

4.1.2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Tanggamus

VISI

“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana”

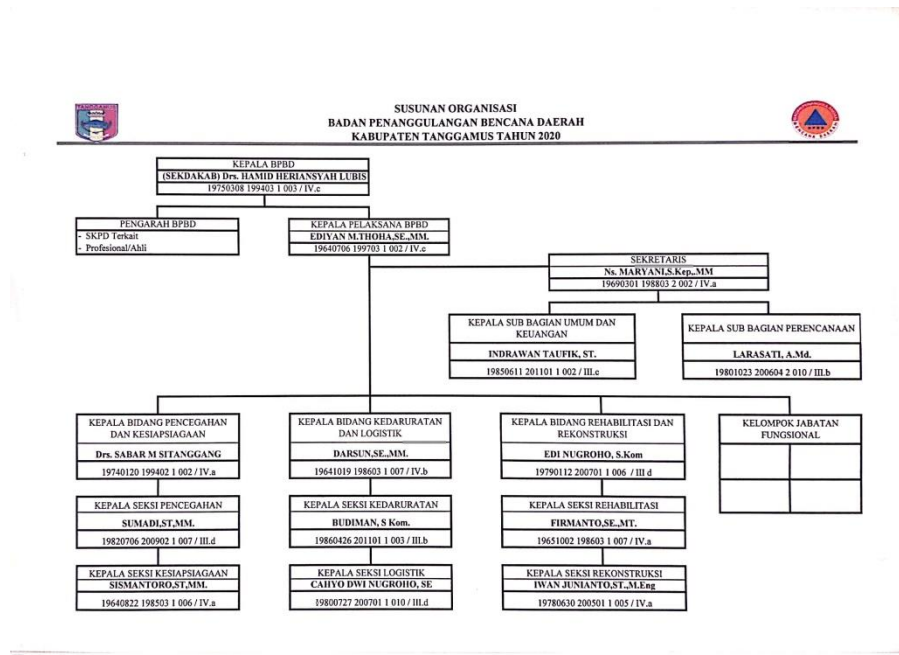
MISI

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dan menyeluruh

4.1.3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus

BPBD Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada gambar 3 (tiga) dan untuk melihat hasil yang lebih jelas dapat membuka daftar lampiran peneliti. Berikut ini struktur organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretariat, Membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - b) Sub Bagian Perencanaan
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , membawahi :
 - a) Seksi Pencegahan.
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
6. Bidang Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus
(Sumber: Dokumen BPBD Kabupaten Tanggamus, 2020)

Gambar 3 merupakan struktur organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus yang peneliti dapatkan dari dokumen arsip BPBD Kabupaten Tanggamus itu sendiri.

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, BPBD Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah serta pembinaan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah Kabupaten Tanggamus;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kabupaten Tanggamus juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Setiap bidang dalam BPBD Kabupaten Tanggamus juga memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut ini peneliti akan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanggamus.

I. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Tugas Pokok: melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

II. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

Tugas Pokok: menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan pencegahan bencana;
- b. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pencegahan bencana;
- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana;
- d. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- e. Menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan dukungan teknis pengelolaan resiko bencana;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pengurangan risiko bencana;
- g. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana kebijakan penanggulangan bencana;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- l. Melaksanakan dan memantau penerapan standar teknis penanggulangan bencana;

- m. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, mitigasi bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

III. KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

Tugas Pokok: melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan kesiapsiagaan bencana;
- b. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana (rencana kontinjensi);
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (rencana kontinjensi);
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan gelar pasukan penanggulangan bencana;
- h. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana;

- i. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pelatihan tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan satgas penanggulangan bencana;
- k. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pelatihan satgas penanggulangan bencana;
- l. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pembentukan posko siaga bencana/pusdalops;
- m. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan operasional posko siaga bencana/pusdalops;
- n. Menyiapkan bahan dan menginformasikan peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar serta peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar serta peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana;
- r. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan mitigasi bencana berbasis masyarakat;
- s. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana, rencana kedaruratan bencana, peringatan dini ancaman bencana, analisis pemenuhan kebutuhan dasar; mitigasi bencana berbasis masyarakat; dan

- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

4.1.5. Renstra BPBD Kabupaten Tanggamus

Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) BPBD Kabupaten Tanggamus disusun dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Tersusunnya Renstra-PD BPBD Kabupaten Tanggamus ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana tugas dan fungsi BPBD dalam mewujudkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanggamus.

Maksud disusunnya Renstra-PD ini adalah sebagai pedoman bagi BPBD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan perencanaan pembangunan yang berisi pilihan-pilihan program kegiatan selama 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra-PD yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
2. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana
3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana

Sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanggamus memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Sehingga bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat dicapai. Sasaran strategis ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran strategis adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan maupun operasional organisasi.

Mengacu pada visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitigasi kebencanaan klimatologi, oseanografi pada kalangan masyarakat WP3K ditetapkan dengan arah kebijakan yaitu: (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, (iii) Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-1726-2002 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, (iv) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Strategi pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan klimatologi dan oseanografi dengan arah kebijakan yaitu: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (ii) Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 327 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang Sebagai Panduan dalam Menyusun Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana, Terkait dengan Penataan Ruang Wilayah, (iii) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Strategi Pemulihan fisik, Sosial, Ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah pasca bencana ditetapkan dengan arah kebijakan yaitu: (i) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (ii) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Program: Pencegahan dan mitigasi

Kegiatan:

- a) Pembentukan desa tangguh bencana
- b) Monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana
- c) Peningkatan atau perkuatan kontruksi
- d) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pendidikan tentang kebencanaan
- e) Penyusunan rencana penanggulangan bencana
- f) Pembangunan daerah penyangga dan pengurangan dampak bencana
- g) Budidaya tanaman mangrove di zona prioritas penanggulangan bencana tsunami dan daerah rawan abrasi di zona prioritas penanggulangan bencana
- h) Pembangunan infrastruktur pencegahan bencana
- i) Pembangunan *break water* di pesisir pantai pada daerah rawan abrasi di zona prioritas penanggulangan bencana tsunami
- j) Publikasi dan sosialisasi panduan standart rumah aman gempa bumi






2. Program: Kesiapsiagaan

Kegiatan:

- a) Optimalisasi posko siaga bencana
- b) Rencana kontijensi, rencana operasi saat terjadi bencana
- c) Menilai resiko bencana
- d) Pendidikan dan latihan jalur evakuasi, gladi dan stimulasi
- e) Manajemen informasi dan keadaan darurat

- f) Pembangunan sistem peringatan dini bencana di zona prioritas penanggulangan bencana kabupaten
- g) Pembangunan jaringan informasi kebencanaan terpusat
- h) Pembangunan sistem peringatan dini tsunami
- i) Peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat
- j) Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas penanggulangan bencana (gempa bumi, tsunami dan banjir)
- k) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kesiapsiagaan bencana (*shelter*, jalur evakuasi dll)
- l) Pemeliharaan gedung penyelamatan/pengungsian (*escape building*) untuk masyarakat di zona prioritas bencana
- m) Simulasi sistem peringatan dini dan evakuasi masyarakat
- n) Penyusunan zona prioritas penanggulangan bencana Tanggamus
- o) Penetapan zona prioritas penanggulangan bencana Tanggamus
- p) Sosialisasi penerapan zona prioritas penanggulangan bencana
- q) Penyusunan rencana kontijensi berdasarkan kajian resiko bencana Tanggamus (banjir, longsor, gempa, tsunami, kebakaran)
- r) Gladi posko bencana (banjir, longsor, gempa, tsunami, kebakaran)
- s) Gladi lapangan bencana (banjir, longsor, gempa, tsunami, kebakaran)

4.1.6. Arti Simbol SOP dalam *Flowchart*

	: <i>Terminator</i>	: Melambangkan dimulai dan diakhirinya suatu prosedur
	: <i>Process</i>	: Melambangkan proses berjalannya suatu prosedur
	: <i>Decision</i>	: Melambangkan pengambilan keputusan ya atau tidak
	: <i>Off Page Connector</i>	: Perpindahan halaman
	: <i>Arrow</i>	: Melambangkan arah prosedur

4.2. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Madang

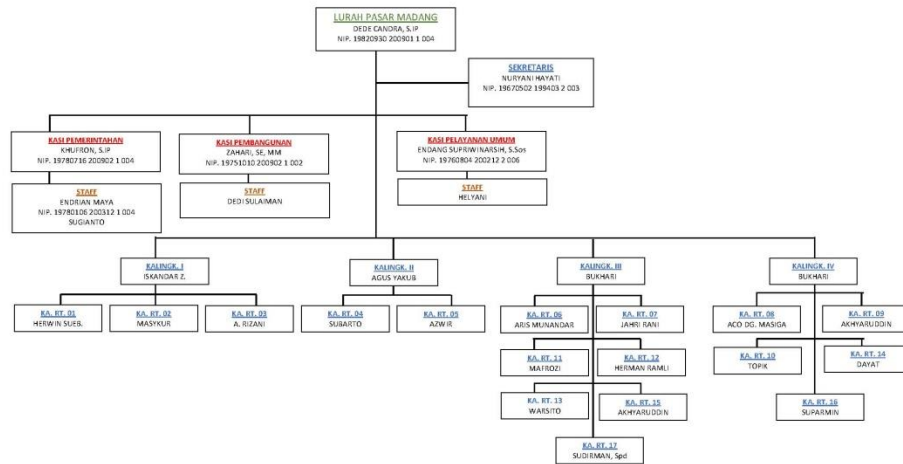
Kegiatan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) perlu memperhatikan data kependudukan di Kelurahan Pasar Madang di atas. Data demografi tersebut dapat menentukan arah dan langkah yang tepat untuk melakukan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Sehingga dalam melakukan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) secara fisik dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kemudian, dengan mengetahui jumlah KK yang ada dapat memudahkan pendataan dalam PRB (Pengurangan Risiko Bencana) melalui keluarga dan lain sebagainya.

Kelurahan Pasar Madang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Letak astronomis Kelurahan Pasar Madang terletak antara $5^{\circ}29'10''\text{LS}$ – $5^{\circ}30'10''\text{LS}$ dan terletak pada $104^{\circ}37'10''\text{BT}$ – $104^{\circ}37'50''\text{BT}$ (Monografi Kelurahan Pasar Madang, 2021). Secara geografis letak kelurahan ini dikelilingi oleh kelurahan dan desa lainnya di Kecamatan Kotaagung. Luas wilayah kelurahan ini sekitar 46 Ha dengan jumlah penduduk 6.375 jiwa, 1.591 KK, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3.300 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.075 jiwa. Kelurahan Pasar Madang terdiri dari 17 RT (Monografi Kelurahan Pasar Madang, 2021).

Batas-batas administrasi Kelurahan Pasar Madang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuripan
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Semaka
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Baros
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Terbaya.

Berikut ini akan peneliti lampirkan struktur organisasi Kelurahan Pasar Madang yang dapat dilihat pada gambar 4 (empat) di bawah ini dan untuk melihat hasil yang lebih jelas dapat membuka daftar lampiran peneliti.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Madang
(Sumber: Dokumen Kelurahan Pasar Madang, 2020)

Gambar 4 merupakan struktur organisasi Kelurahan Pasar Madang yang peneliti dapatkan dari dokumen arsip Kelurahan Pasar Madang itu sendiri.

4.3. Gambaran Umum Kelurahan Baros

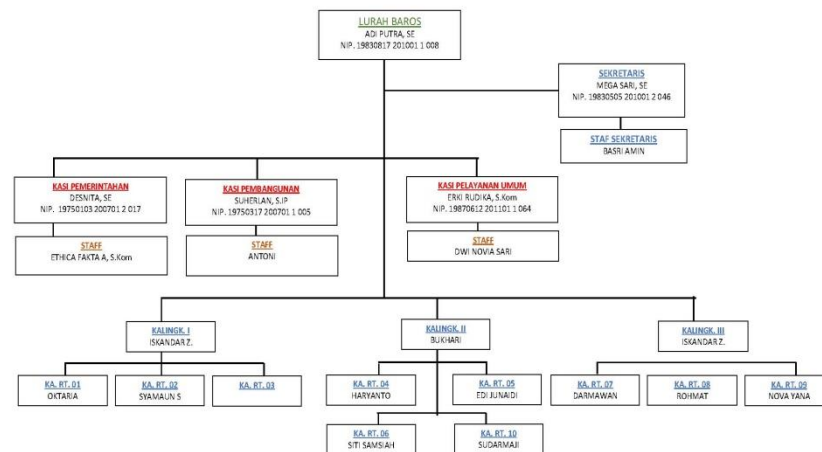
Kegiatan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) perlu memperhatikan data kependudukan di Kelurahan Baros di atas. Data demografi tersebut dapat menentukan arah dan langkah yang tepat untuk melakukan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Sehingga dalam melakukan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) secara fisik dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kemudian, dengan mengetahui jumlah KK yang ada dapat memudahkan pendataan dalam PRB (Pengurangan Risiko Bencana) melalui keluarga dan lain sebagainya.

Kelurahan Baros berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Secara geografis letak kelurahan ini dikelilingi oleh kelurahan dan desa lainnya di Kecamatan Kotaagung. Luas wilayah kelurahan ini sekitar 45 Ha dengan jumlah penduduk 4.355 jiwa, 1.190 KK, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 2.199 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.156 jiwa. Kelurahan Baros terdiri dari 10 RT (Monografi Kelurahan Baros, 2021).

Batas-batas administrasi Kelurahan Baros adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuripan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Semaka
- Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Negeri Ratu
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Madang

Berikut ini akan peneliti lampirkan struktur organisasi Kelurahan Baros yang dapat dilihat pada gambar 5 (lima) di bawah ini dan untuk melihat hasil yang lebih jelas dapat membuka daftar lampiran peneliti.



Gambar 5. Struktur Organisasi Kelurahan Baros
(Sumber: Dokumen Kelurahan Baros, 2021)

Gambar 5 merupakan struktur organisasi Kelurahan Baros yang peneliti dapatkan dari dokumen arsip Kelurahan Baros itu sendiri.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritik, hasil penelitian dan pembahasan terkait optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek tujuan dinyatakan sudah optimal karena seluruh masyarakat tidak hanya telah mengetahui tujuan dari PRBBK berdasarkan kegiatan yang telah tersusun di dalam renstra BPBD Kabupaten Tanggamus melalui sosialisasi dan sekolah kebencanaan. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri juga telah melakukan kegiatan simulasi bersama masyarakat serta masyarakat telah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan mitigasi bencana tsunami.
2. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek standar dinyatakan belum optimal karena memiliki keterbatasan arsip dokumen yang sudah menjadi salah satu bentuk SOP yang telah diatur di dalamnya mengenai kelengkapan dokumen serta masih adanya beberapa masyarakat yang merasa kurang puas terhadap tindakan atau ketangkasan dan kecepatan dari BPBD Kabupaten Tanggamus itu sendiri dalam merespon suatu bencana yang terjadi.
3. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek kelengkapan peralatan dinyatakan belum optimal karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat seperti ketiadaannya persebaran spanduk-spanduk ataupun film yang berisikan tentang dampak-dampak kronologis alam yang ada di Teluk Semangka di daerah pantai dan permukiman ramai. Lalu, ketiadaannya posko yang terdapat petugas yang dapat mengecek kondisi laut dan mampu memberikan

informasi secara akurat apabila sewaktu-waktu terjadinya gempa sebelum BPBD Kabupaten Tanggamus datang ke lokasi. Terakhir, hingga saat ini di Kecamatan Kotaagung belum adanya tempat evakuasi utama seperti yang ada di Aceh yang dapat menampung seluruh masyarakat sehingga tidak tersebar dimana-mana.

4. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek kompetensi aparatur ini belum optimal karena pada bagian tugas aparatur yaitu bagian pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan ini berkaitan pula dengan aspek standar dan aspek kelengkapan peralatan yang menyatakan bahwasanya dokumen yang didapatkan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus tidak lengkap serta selama proses sosialisasi dan simulasi bencana tsunami sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena masyarakat tidak pernah merasakan bencana tsunami itu langsung.
5. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek motif dinyatakan belum optimal karena terdapat masalah dana. Masalah dana ini juga berkenaan dengan motivasi aparatur dan keberlanjutan kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami dengan forum yang telah dibentuk yaitu destana.
6. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek peluang dinyatakan belum optimal karena walaupun BPBD Kabupaten Tanggamus telah membentuk destana dan sudah menyelenggarakan pelatihan. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang sulit untuk diajak melakukan kegiatan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri serta destana ini sudah tidak berjalan lagi dan kegiatan diseminasi informasi menjadi terhenti. Sehingga mampu membuat tingginya risiko yang disebabkan oleh bencana tsunami itu sendiri.
7. Kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek umpan balik dinyatakan belum optimal karena motivasi dinyatakan berdampak atau

berpengaruh pada umpan balik aparaturnya yaitu dana. Kendala pada dana ini pun berdampak terhadap keberlanjutan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami seperti ketidakaktifan forum destana yang telah dibentuk oleh BPBD Kabupaten Tanggamus yang menyebabkan keterbatasan arsip dokumen yang sudah menjadi salah satu bentuk SOP yang telah diatur di dalamnya mengenai kelengkapan dokumen dan kepuasan masyarakat terhadap tindakan atau ketangkasan dan kecepatan dari BPBD Kabupaten Tanggamus itu sendiri dalam merespon suatu bencana yang terjadi.

8. BPBD Kabupaten Tanggamus telah membuat proposal untuk pencairan dana sebagai penunjang keberlanjutan kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana serta bekerja sama dengan destana yang telah dibentuk sebagai upaya dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan untuk peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam mengoptimalkan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Mulai aktifkan kembali destana, selenggarakan kegiatan pelatihan kepada anggota destana setiap 1 (satu) bulan sekali secara rutin, lakukan monitoring dengan destana, lakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung tanpa hanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara teori saja di dalam satu ruangan. Hal ini dianggap mampu mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek tujuan.

2. Melakukan kegiatan monitoring terkait pengadaan arsip dengan destana sesering mungkin, lakukan simulasi secara rutin untuk melatih ketanggapan dan ketangkasan aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus maupun anggota destana dalam merespon suatu bencana yang terjadi. Hal di atas dianggap mampu mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek standar.
3. Melakukan pengajuan dana ulang ke pemerintah pusat dengan melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan secara berkala di Kelurahan atau desa. Hal di atas dianggap mampu untuk mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek kelengkapan peralatan.
4. Melakukan kegiatan monitoring dengan destana sesering mungkin mengenai pengadaan arsip, lakukan simulasi secara rutin untuk melatih ketanggapan dan ketangkasan aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus maupun anggota destana dalam merespon suatu bencana yang terjadi, lakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung tanpa hanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara teori saja di dalam satu ruangan. Hal di atas dianggap mampu mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek kompetensi aparatur.
5. Pertahankan semangat aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus dalam melakukan kegiatan PRBBK, tingkatkan motivasi aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus dengan cara memberikan bonus apabila kompetensi yang dimiliki oleh aparatur baik dan memberikan sanksi atau hukuman apabila aparatur melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Hal di atas dianggap mampu mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek motif.
6. Mulai aktifkan kembali destana, selenggarakan kegiatan pelatihan kepada anggota destana setiap 1 (satu) bulan sekali secara rutin, lakukan monitoring dengan destana, lakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung mengenai kebencanaan tanpa hanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara teori saja di dalam satu ruangan. Hal di atas dianggap mampu meminimalisir tingginya risiko yang disebabkan oleh

bencana tsunami itu sendiri dan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek peluang dapat optimal.

7. Melakukan pengajuan dana ulang ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami sehingga destana ini sendiri dapat berjalan kembali, melakukan monitoring terjadwal, *brown bag lunch* (makan siang bersama setiap seminggu sekali), memberikan pujian di depan umum sehingga memotivasi aparatur untuk menindaklanjuti diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami ini dengan sungguh-sungguh. Hal di atas dianggap dapat mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek umpan balik.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Samsul. 2016. *Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)*. Tesis Universitas Airlangga. Tersedia di Repository Unair dan diakses pada 21 November 2020.
- Barata, A.A. 2014. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- BNPB. 2016. *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Budiono dan Dewi Suryani. 2016. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening pada PT. Kerta Rajasa Raya. *Journal Of Research In Economics And Management* Vol 16 No 1. Universitas Negeri Surabaya.
- Byremo, Cathrine. 2015. *Human resource Management and Organisation Performance: Does HRM Lead to Improved Organisational Performance?.* Master Thesis. University of Oslo, Hal: 1-49.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Collins, Laura dan Carmen Muñoz. 2016. The Foreign Language Classroom: Current Perspectives and Future Considerations. *Jurnal Modern Language Journal*. Tersedia di Wiley Online Library dan diakses pada 10 Juni 2021.
- Darmasetiadi, D. 2019. Optimalisasi Diseminasi Informasi Pada Mitigasi Bencana. *Jurnal in Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* Vol 1 No 1.

- Daulay, Raihanah., Efry Kurnia, Irvan Maulana. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan* Vol 1 No 1, Hal 209-218. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Destiani, Deanti Dwi. 2019. *Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Purwakarta*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung. Tersedia di Repository Unpas dan diakses pada 28 September 2021.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, hal 250.
- Hasbullah. 2018. Analisis Pengaruh Orientasi Umpa Balik dan Orientasi Tujuan Terhadap Kinerja Manajer Pabrik. *Jurnal PASTI* Vol XII No 1. Universitas Mercu Buana.
- Hasibuan. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Kunci Keberhasilan*. Jakarta: CV Haji Mas.
- Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Kunci Keberhasilan*. Jakarta: CV Haji Mas.
- Husnan dan Heidjrachman. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Warga.
- Jamil, Ade Yusuf. 2016. *BAB II Tinjauan Pustaka*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung. Tersedia di Repository Unpas dan diakses pada 16 September 2021.
- Julianry, Anriza., Rizal Syarief, dan M. Joko Affandi. 2017. Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan serta Kinerja Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* Vol 3 No 2.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

- Lessy, Mohammad Ridwan dan Jefry Bemba. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Rentan Bencana Melalui Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Desa Daruba Pantai Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Pengamas* Vol 2 No 1.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Cetakan Kesebelas ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marjaya, Indra dan Fajar Pasaribu. 2019. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* Vol 2 No 1.
- Mesran, dkk. 2018. Implementasi Metode *Electre* dalam Penentuan Karyawan Berprestasi (Studi Kasus: PT. Megarimas Sentosa). *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika (Jurasic)* Vol 3.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, Alex S. 2012. *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Djauhari. 2014. *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Yogyakarta: Deepublish. Edisi 1 cetakan 1. Tersedia di *E-Book* dan diakses pada 13 Desember 2020.
- Nugroho, Kharisma dan Yon, Kwan Men. 2011. *Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia*. Laporan Penelitian Gerakan, Pelembagaan, dan Keberlanjutan dari Perspektif Gerakan sosial di Indonesia.
- Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemn Bencana*. Bandung: Alfabeta.

- Pariipurno, Eko Teguh. 2011. *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Buku 1: pentingnya PRBBK, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.*
- Prastika, Inda Sintya. 2020. Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor. *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Vol 4 No 4. Universitas Negeri Semarang.
- Pratama, Siswa. 2019. Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Prasarana dan lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Studi pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Manajemen Tools* Vol 11 No 1.
- Puryantini, Navik., Rofikotul Arfati, dan Bambang Tjahjadi. 2017. Pengaruh *Knowledge Management* Terhadap Kinerja Organisasi Dimediasi Inovasi di Organisasi Penelitian Pemerintah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol 02 No 02, Hal: 21-38.
- Quansah, Nancy. 2013. *The Impact of HRM Practice on Organizational Performance: The Case Study of Some Selected Rural Banks.* Master Thesis. College of Art and Social Science School of Business.
- Sarapang, Herni tandi., dkk. 2019. Analisis Kerentanan Bencana Tsunami di Kota Palu. *Jurnal Spasial* Vol 6 No 2.
- Siagian, P Sondang. 2014. *Pengembangan Organisasi dan Staf.* Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Sirapati, Fendi Irawan. 2015. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. *E-Journal Administrasi Negara* Vol 3 No 4.
- Siswadi, Gun Gun. Tanpa tahun. *Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik oleh Lembaga Pemerintah: Studi Pada Lembaga Informasi Nasional.* Tesis Universitas Indonesia. Tersedia di Digilib UI dan diakses pada 21 November 2020.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suri, Nur Khotimah. 2015. Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. *Perspektif* Vol.8, No.1.
- Suryani, Ni Kadek dan John E. H. J. FoEh. 2018. *Kinerja Organisasi*. Sleman: Deepublish.
- Tamitiadini, Dian., Wayan Weda Asmara Dewi, Isma Adila. 2019. Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerja Sama. *Jurnal Conference on Communication and New Media Studies* Vol.13 No 1, Hal: 41-52.
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. *Bab 2 Tinjauan Pustaka*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tersedia di Repository USU dan diakses pada 21 November 2020.
- Tihurua, Ahmad S. 2017. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat (Studi pada Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah). Skripsi Universitas Brawijaya. Tersedia di Repository UB dan diakses pada 20 Januari 2021.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: ANDI.
- Yamada, Fumihiko., Ryuji Kakimoto, Miyuki Yamamoto, Toshio Fujimi, Naoto Tanaka. 2011. Implementation of Community Flood Risk Communication in Kumamoto, Japan. *Journal of Advanced Transportation*, 45: 117-128 (in Japanese).
- Zumria, Sartika., Tommy dan Bonar. 2019. Peran Orientasi Kesadaran Sosial Terhadap Karakteristik dan Reaksi Umpan Balik. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol 3 No 2. Universitas Tarumanegara.

Peraturan :

BNPB No. 8 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembar Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara: Jakarta.

Lain-lain:

Fortunisa, Ananda., dkk. 2018. *Implikasi Reward Vacation and Holiday Terhadap Motivasi Karyawan PT Bank Permata Divisi Marketing*. Penelitian Mandiri. Universitas Bakrie. Tersedia di Repository Bakrie dan diakses pada 28 September 2021.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo., Ita Prihantika, Meiliyana, Dewie Brima Atika. 2019. *Pelatihan Penguatan Resiliensi Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Menghadapi Bencana Alam Pada SMAN 2 Kotaagung Kabupaten Tanggamus*. E-Katalog Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat II 2019. Universitas Lampung: LPPM. Tersedia di Repository LPPM Unila dan diakses pada 21 November 2020.

Irene, Putri. 2016. *Umpan Balik*. Tersedia di Web Staff Gunadarma Putri Irene dan diakses pada 16 September 2021.

Ma'arif, Syamsul., Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2019. *Penyuluhan Manajemen Bencana Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Kotaagung Kabupaten Tanggamus*. E-katalog Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat II 2019. Universitas Lampung: LPPM. Tersedia di Repository LPPM Unila dan diakses pada 21 November 2020.

Susanto, EH. 2011. *Eksistensi Komunikasi Dalam menghadapi Bencana*. Karya Ilmiah Dosen, 1-14. Tersedia di Web Researchgate dan diakses pada 21 November 2020.